

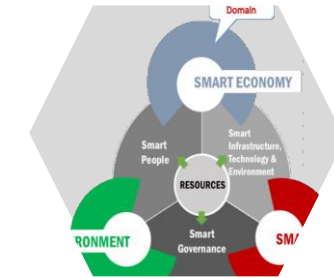


Jateng
gayeng

PENGENDALIAN OPERASIONAL

KEGIATAN TWII 2019

Semarang, 23 Juli 2019



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

PROVINSI JAWA TENGAH



@diskominfo_jt



@kominfojateng



diskominfo.jatengprov.go.id

APBD 2019 Diskominfo

Rp. 74.982.053.000

Belanja Tidak Langsung
19.982.053.000 (26,65%)

Gaji Pegawai
Tunjangan Pegawai

BTL

Perencanaan & Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
(2 Kegiatan)
750.000.000 (1,36%).

Manajemen Adm Yan Umum,
Kepegawaian & Keuangan PD
(13 Kegiatan)
6.529.914.000 (11,87%)

Peningkt sandi daerah & KI
(3 Kegiatan)
1.081.322.000 (1,97%)

EX-BAU

SANDI

KOMINFO

**STATIS
TIK**

Belanja Langsung

55.000.000.000 (73,35%)

Kegiatan Diskominfo

Peningkt Kualitas Pengelolaan
Infokom Publik (3 Kegiatan)

16.014.250.000 (29,12%)

Pengemb Infrastruktur TIK
(3 Kegiatan)

22.916.250.000 (41,67%)

Pengemb E-Govt (3 Kegiatan)

4.534.714.000 (8,24%)

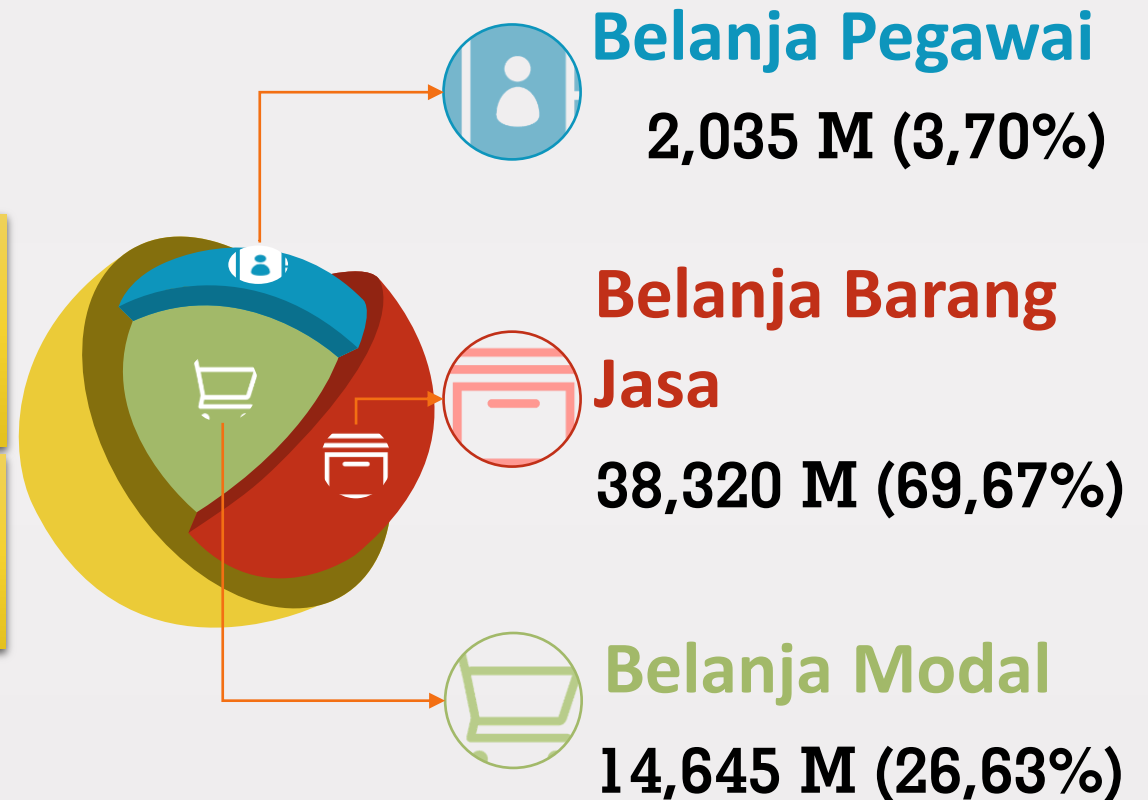
Pengemb Data Statistik Sektoral &
Keterbukaan Informasi (4 Kegiatan)

3.173.550.000(5,77%)

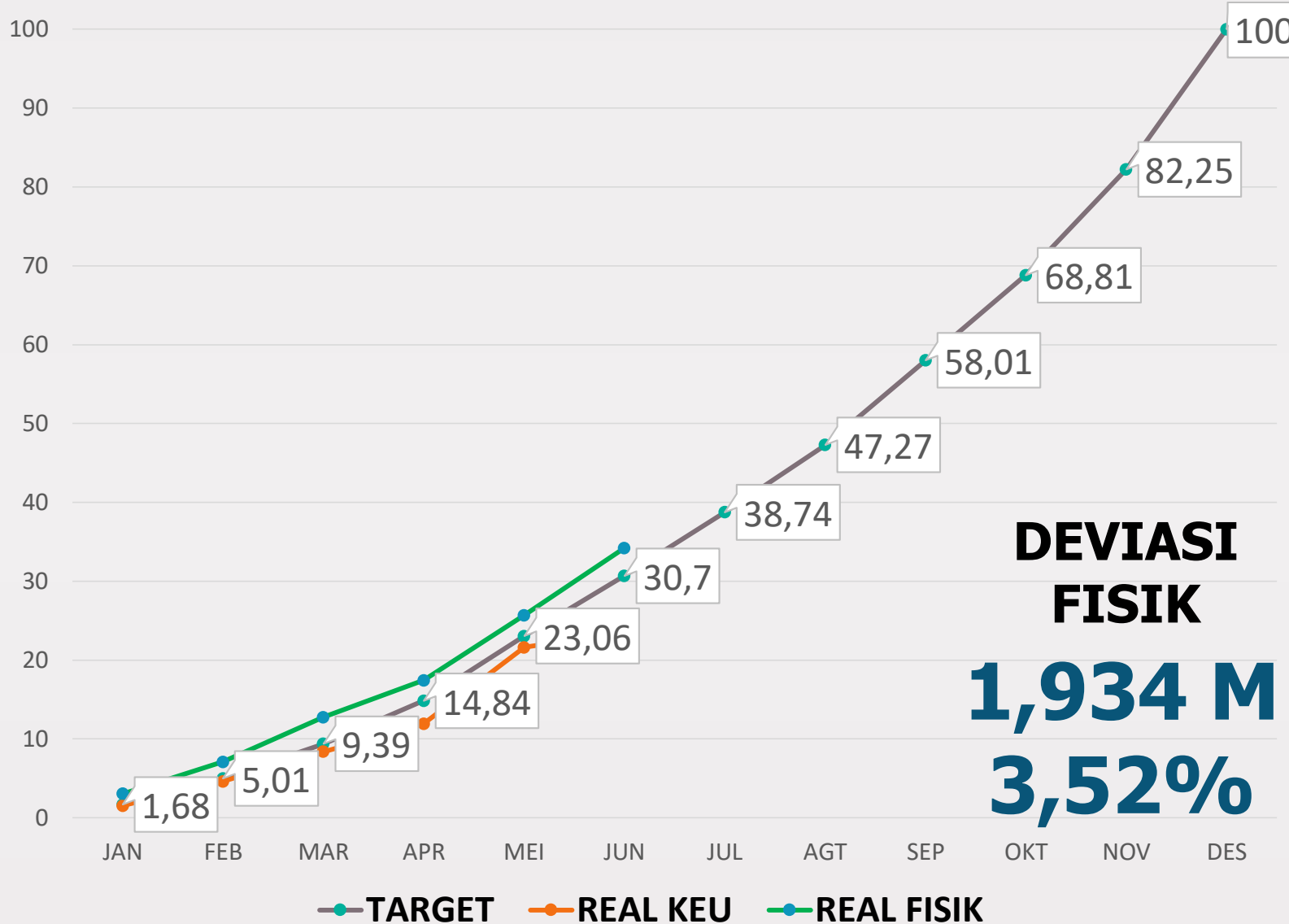
Belanja Langsung Diskominfo

Anggaran BL

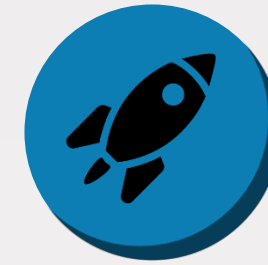
55 Milyar



BL DISKOMINFO



DEVIASI FISIK
1,934 M
3,52%



TARGET FISIK

16,884 M
30,70%



REAL KEU

12,925 M
23,50%



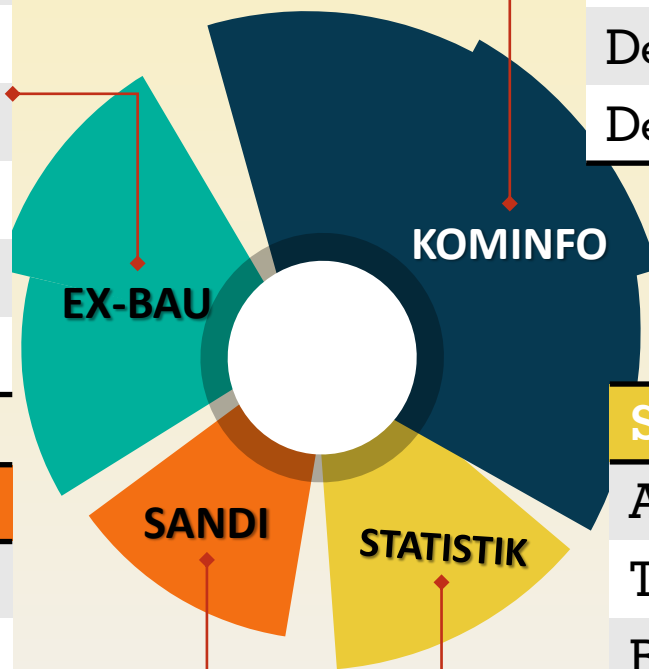
REAL FISIK

18,820 M
34,22%

REALISASI APBD per Urusan

EX-BAU/ SEKRETARIAT			
Anggaran	7,279 M		
Target Fisik	3,285 M	45,13%	
Real Keu	2,705 M	37,16%	
Real Fisik	3,398 M	46,68%	
Deviasi Fisik (+)	112,807 Juta	1,55%	
Deviasi Keu	(693,144 Juta)	(9,52%)	

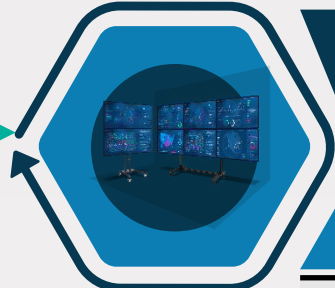
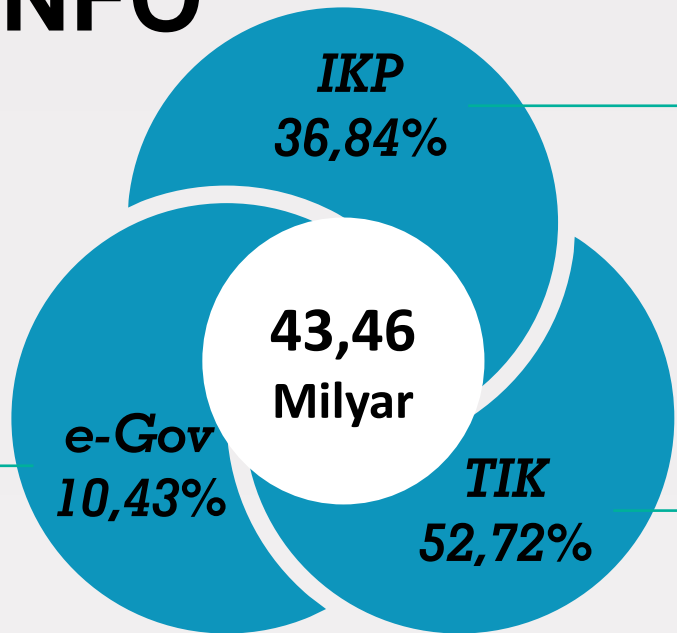
PERSANDIAN			
Anggaran	1,081 M		
Target Fisik	656,483 Juta	60,71%	
Real Keu	581,223 Juta	53,75%	
Real Fisik	689,963 Juta	63,81%	
Deviasi Fisik	33,479 Juta	3,10%	
Deviasi Keu	(108,739 Juta)	(10,06%)	



KOMINFO			
Anggaran	43,465 M		
Target Fisik	5,150 M	32,16%	
Real Keu	8,297 M	19,09%	
Real Fisik	13,184 M	30,33 %	
Deviasi Fisik (+)	1,726 M	3,97%	
Deviasi Keu	(4,886 M)	(11,24%)	

STATISTIK			
Anggaran	3,173 M		
Target Fisik	1,485 M	46,82%	
Real Keu	1,341 M	42,27%	
Real Fisik	1,547 M	48,78%	
Deviasi Fisik (+)	62,056 Juta	(1,96%)	
Deviasi Keu	(206,557 Juta)	(6,51%)	

KOMININFO



Pengemb Kualitas PI & Komunikasi Publik

16.014.250.000

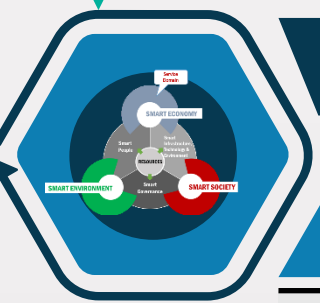
Target Fisik	5,150 M	32,16%
Real Keu	3,022 M	18,87%
Real Fisik	5,586 M	34,88%
Deviasi Fisik (+)	435,744 Juta	2,72%
Deviasi Keu	(2,563 M)	(16,01%)



Pengemb Infrastruktur TIK

22.916.250.000

Target Fisik	4,537 M	19,80%
Real Keu	3,295 M	14,38%
Real Fisik	5,558 M	24,25%
Deviasi Fisik (+)	1,021 M	4,46%
Deviasi Keu	(2,262 M)	(9,87%)



Pengemb E-Govt

4.534.714.000

Target Fisik	1,770 M	39,04%
Real Keu	1,979 M	43,66%
Real Fisik	2,039 M	44,98%
Deviasi Fisik (+)	269,259 Juta	5,94%
Deviasi Keu	(59,778 Juta)	(1,32%)





Capaian Kinerjanya



Rincian Kegiatan

AKSI HAM

Dinas Kominfo diminta untuk **meyediakan rekap aduan masyarakat khususnya terkait dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan**

JADWAL PELAPORAN

a. B03 tanggal 28 Maret – 11 April 2019;

b. B06 tanggal 28 Juni – 11 Juli 2019;

c. B09 tanggal 28 September – 11 Oktober 2019;

d. B12 tanggal 28 Desember 2019 – 11 Januari 2020

INDEKS RB 2019 (LKE)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. JATENG

KOMPONEN PENGUNGKIT:

PENATAAN TATA LAKSANA

2. e-GOVERNMENT : NILAI 1,5

- Rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi
- Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)

3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : NILAI 1,25

- Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

LIKE RB 2019 B.06

Penilaian				Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan
IV.	PENATAAN TATALAKSANA (5)							
	2	E-Government (2)				1,50	100,00 %	
		a	Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi	Ya	1		Nama Dokumen : Master Plan Smart Province, Master Plan TIK, Pergub Nomor 89 Tahun 2016 (Integrasi Sistem Informasi)
		b	Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll)	a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi	A	1		- Video GRMS - Bagan Integrasi App



Penilaian			Penjelasan	Jawaban	Nilai	%
		3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)			1,25	100,00 %
		a . Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya	1	
		b . Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala	A	1	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Nama Dokumen : SK GUB NO 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID PROV JATENG
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Monev Web akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019

ROADMAP RB

DISKOMINFO

2018

2023

Tujuan RB PROVINSI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (*Good governance and Clean government*)

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik

Indikator Kinerja

Indeks SPBE

2018	2019	2020	2021	2022	2023
3,68 (Hasil Evaluasi Kemenpan-RB)	2,76	2,88	3,0	3,12	3,24

Program Prioritas

Area Perubahan

Target Indikator / *Keg Prioritas*

8

Area Perubahan

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan & Penguatan Kelembagaan
4. Tatalaksana
5. Sistem Manajemen SDM
6. Akuntabilitas Kinerja
7. Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

Peningkatan Efektifitas & Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Peningkatan Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen SDM Aparatur

4. Sistem Tatalaksana yang baik

Indeks SPBE

2019	2020	2021	2022	2023
2,76	2,88	3,0	3,12	3,24

Pengemb & Pengelolaan App berbagi pakai (Jml)

2019	2020	2021	2022	2023
9	11	13	14	15

Penguatan keterbukaan informasi publik (OPD)

2019	2020	2021	2022	2023
49	49	49	49	49

8. Pelayanan Publik yang berkualitas

Persentase tindak lanjut pengaduan

2019	2020	2021	2022	2023
85	86	87	88	89

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik (OPD)

2019	2020	2021	2022	2023
49	49	49	49	49

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan RB Kab./Kota

Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota

Sasaran

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*
- 2. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan*
- 3. Meningkatnya Efisiensi Kelembagaan dan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Baik*

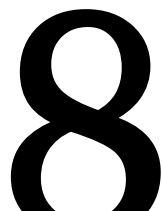
Indikator Kinerja

Indeks SPBE Kab./Kota 2,6 ke atas

2018	2019	2020	2021	2022	2023
14*	5	10	15	18	20

*Hasil identifikasi eks bakorwil I, II & III

Area Perubahan



Area Perubahan Kabupaten/ Kota

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan & Penguatan Kelembagaan
4. Tatalaksana
5. Sistem Manajemen SDM
6. Akuntabilitas Kinerja
7. Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Target Indikator

Keg Prioritas

4. Sistem Tatalaksana yang baik

1. Jumlah Kab./ Kota yang Indeks SPBE-nya 2,6 ke atas

2018	2019	2020	2021	2022	2023
14*	5	10	15	20	25

Koordinasi/Fasilitasi perluasan penerapan e-gov yang terintegrasi (Kab./Kota)

2019	2020	2021	2022	2023
35	35	35	35	35

2. Jumlah Kab./Kota yang Nilai Keterbukaan Informasi Publik 60 ke atas

2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	20	23	26	28	30

Koordinasi/Fasilitasi penerapan keterbukaan informasi publik (Kab./Kota)

2019	2020	2021	2022	2023
35	35	35	35	35

QUICK WIN

(RB 2018-2023)
DISKOMINFO

“Program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat”

Layanan Sistem Satu Data

Kegiatan Prioritas	Satuan	Target (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Pengintegrasian Data	Data di Perangkat	20	40	60	80	90

Indikator SDGs *DISKOMINFO (2018-2023)*

GOAL/TARGET	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband		KEWENANGAN PUSAT (BUKAN KEWENANGAN DAERAH)					
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat	Presentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan		KEWENANGAN BIRO APBJ SETDA PROV. JATENG					
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional	Tersedianya badan publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DIP	50	60	65	70	75	80
	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Provinsi	DIP	50	60	65	70	75	80
	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	%	80	81	82	83	84	85
<i>Target 17.6. Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global</i>	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband		KEWENANGAN PUSAT (BUKAN KEWENANGAN DAERAH)					